

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. karena dengan rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ini telah selesai disusun.

Kami menyadari dalam menyusun Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan yang memerlukannya.

Tanjung Selor, Agustus 2021
Kepala Badan,



MUHAMMAD ISHAK, SE, MM
Pembina Utama Muda, (IV/d)
NIP. 19640823 198601 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Awal Renja	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPSDM TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPSDM	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	35
3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.1.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi	38
3.2. Tujuan dan Sasaran	39
3.2.1. Tujuan	40

3.2.2. Sasaran	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
4.1. Rencana Program dan Kegiatan	42
BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara	18
Tabel 2.2	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPSDM Prov. Kaltara	25
Tabel 2.3	
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 BPSDM Prov. Kaltara	28
Tabel 2.4	
Usulan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota BPSDM Prov. Kaltara	34
Tabel 3.1	
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 yang mendukung Prioritas Nasional	37
Tabel 3.2	
Indikasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022 Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah	39
Tabel 3.3	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara	41
Tabel 4.1	
Rumusan Rancangan Awal Rencana Program dan Kegiatan Pada Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dan dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. RKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan kepala daerah setelah RKPD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27 bahwa kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai sebuah dokumen resmi SKPD.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 232 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016

tentang Perangkat Daerah pasal 24 bahwa Badan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dengan hal ini Badan Daerah Provinsi membantu Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dengan RKPD Provinsi Kalimantan Utara, dimana Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah kedepan.

Dokumen Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan Instansi Pemerintah wajib memberikan kesempatan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansinya. Pengembangan kompetensi yang salah satunya melalui pendidikan pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalitas ASN dalam mengemban fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pengembangan SDMA maka setiap lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi, baik diklat dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), diklat kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik.

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebagai lembaga penyelenggara diklat harus mematuhi berbagai ketentuan dan standar yang ditetapkan dalam peraturan Kepala LAN, keberadaan petunjuk teknis penyelenggaraan diklat dapat dijadikan pedoman dan digunakan sebagai standar penyelenggaraan Oleh BPSDM Provinsi Kalimantan utara dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara. Kualitas dokumen Renja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja yang merupakan cerminan kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan penyelenggaraan serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari SKPD.

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur fasilitator pengembangan SDMA Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pengembangan SDMA, pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

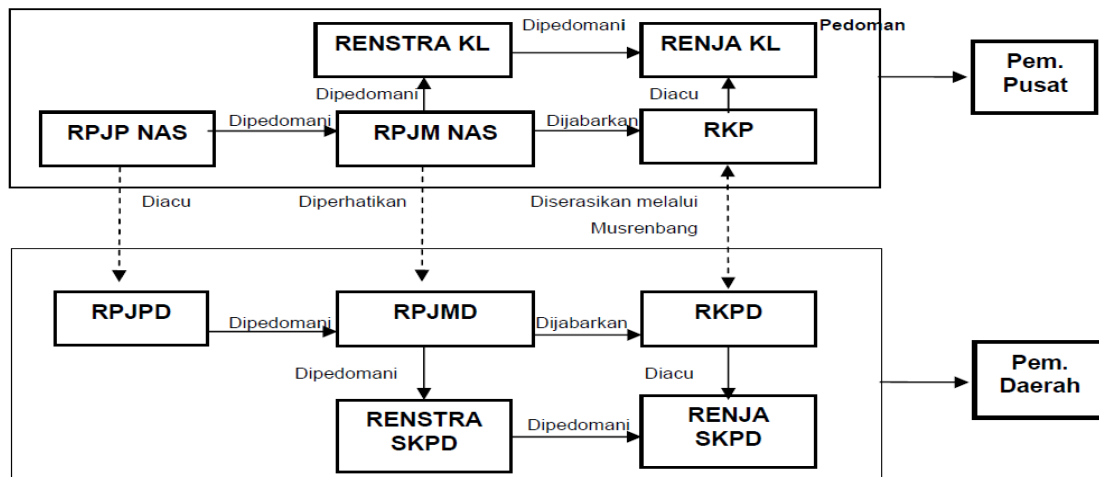
BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengembangan SDMA dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut BPSDM Provinsi Kalimantan Utara tentunya dapat melakukan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan SDMA, penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur dilingkungan pemerintahan Provinsi

dan Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan SDMA di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kebijakan, program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran indikatif kegiatan secara rinci. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 Ayat 2 bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan RKPD, Penyusunan Renja dimaksud agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan di dalam dokumen rencana tahunan SKPD.

Proses penyusunan Renja SKPD, sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa setiap SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan rancangan awal RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keterkaitan Renja dengan Renstra serta dengan dokumen lainnya dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diterangkan bahwa proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan renja SKPD. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja SKPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini mengacu kepada beberapa produk perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 511);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor.....Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor.....)
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 9);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor.... Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor.....)
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor.... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor.....)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Ranwal Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/kegiatan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Sedangkan tujuan dari penyusunan Ranwal Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana program dan kegiatan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 berdasarkan Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.
2. Mengevaluasi Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalimantan Utara tahun sebelumnya.
4. Tersusunnya dokumen perencanaan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Sebagai panduan penyusunan RKA Tahun Anggaran 2022

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Ranwal Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini disusun berdasarkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana, serta rencana program dan

kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPSDM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021, mengacu pada tahun berjalan serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari visi dan misi kemudian tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijaksanaan yang akan ditempuh, menggunakan strategi yang tepat dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat dari kebijaksanaan yang ditempuh. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini disusun secara sistematis, jelas dan terukur dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan waktu yang akan dipergunakan.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan yang baik yang bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui suatu evaluasi pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Hasil Evaluasi Program Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jumlah alokasi anggaran dalam APBD Provinsi

Kalimantan Utara tahun 2020, pada tahun anggaran 2020 terdapat alokasi anggaran belanja APBD sebesar Rp. 11.725.590.516,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam belas rupiah). Pendanaan dimaksud untuk pelaksanaan 5 (lima) program dengan 30 (tiga puluh) kegiatan, namun dalam pelaksanaan kegiatan adanya kasus Pandemi Covid-19 yang membuat seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan menjadi kurang optimal dalam segi pelaksanaan. Realisasi penggunaan anggaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp.9.025.315.782,- (sembilan milyar dua puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 76,97% (tujuh puluh enam koma sembilan tujuh persen) sedangkan realisasi fisik sebesar 97,22% (sembilan puluh tujuh koma dua dua persen). Realisasi ini telah dilakukan pengukuran dan evaluasi indikator kinerja melalui pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, sehingga diperoleh nilai capaian kinerja outcome (hasil) dengan nilai sebesar 98,15% (sembilan puluh delapan koma lima belas persen) yang termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST).

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Program (outcome) yang memenuhi target kinerja diantaranya:

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik
- Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal

Program Pengembangan Kompetensi

- Pelaksanaan Pelatihan / Workshop / Kursus - Kursus Singkat / Bimtek
- Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional
- Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan
- Pelaksanaan Rumpun Diklat Pelatihan Dasar CPNS

2.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Program (outcome) yang tidak memenuhi target kinerja diantaranya :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Makanan dan Minuman

Program Pengembangan Kompetensi :

- Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis (berpola klasikal dan terkendala pandemi covid sehingga tidak berjalan, sudah mulai berlangsung mulai bulan Mei sampai akhir Juni melalui Webinar. Dilaksanakan dengan menggunakan

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dengan capaian kinerja tidak mencapai jumlah peserta yang didiklatkan)

- Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis Perangkat Daerah Penunjang (capaian peserta yang mengikuti pelatihan tidak mencapai target kinerja dikarenakan kendala kegiatan yang terhambat pandemic covid 19)

Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi :

- Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi (terkendala Pandemi Covid, Kemendagri menunda kegiatan, lanjutannya di awal bulan Agustus berpola online)
- Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama (capaian target tidak tercapai dikarenakan media sumber belajar berupa majalah dan bulletin yang produksinya dikurang tidak sesuai dengan target produksi yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai target)
- Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan (Kegiatan akreditasi BPSDM karena sudah tercantum di SAKIP, sertifikasi dari C ke B. untuk menaikkan akreditasi terdapat persyaratan khusus yakni ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pelatihan yang belum tersedia di BPSDM Prov. Kaltara sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini disediakan biaya konsultasi bagi BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dengan tim penilaian akreditasi dari pusat, berhubung dengan keadaan pandemic covid-19 maka kegiatan belum bisa terlaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya)

2.1.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target kinerja diantaranya :

- Adanya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat secara nasional berdasarkan Keputusan

- Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara 188.44/K362/2020 tentang Penetapan status tanggap darurat bencana wabah Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud yang berdampak pada ditunda bahkan dibatalkannya kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dalam suatu forum kegiatan
- Narasumber dan Fasilitator yang berasal dari daerah terdampak menyebabkan dibatalkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
 - Sumber Daya Manusia yang belum memadai, mengakibatkan kegiatan berjalan menjadi kurang efektif
 - Tempat pelaksanaan kegiatan yang berjauhan mengakibatkan mobilitas kegiatan menjadi terhambat sehingga jadwal kegiatan yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan tepat waktu
 - Belum tercukupinya jumlah tenaga pengajar (Widyaiswara) dan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, workshop, bimtek dan lain sebagainya

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPSDM dan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara menjadi Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara, dirumuskan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien dan efektif dan akuntabel dengan Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif

Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan dan program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tidak mencapai target realisasi dikarenakan efek pandemic covid-19 yang menunda pelaksanaan pelatihan secara klasikal sehingga memberikan dampak pada kurang optimalnya pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Namun hal ini segera diatasi dengan mengubah metode pelaksanaan pelatihan dari yang semula secara klasikal menjadi metode pelatihan e-learning.

- 2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
- Mengatur Jadwal pelaksana kegiatan sehingga kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas

-
- Mempergunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan lain yang menunjang mobilitas kegiatan
 - Mengundang pengampu mata diklat dari Perangkat Daerah lain yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mengundang tenaga pengajar dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (P3K DOD) untuk memberikan mata pelatihan tertentu.
 - Melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan protocol kesehatan dengan anjuran adaptasi kebiasaan baru

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

Tabel : 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara
s/d Tahun Anggaran 2021

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2021)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D (N- 3) 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1) 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 5+7+9	(11) = 10/4
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun (dokumen)	-	-	-	-	0.00	2	2	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun (dokumen)	-	-	-	-	0.00	2	2	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	0.00	12	12	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (bulan)	60	34	12	12	100.00	12	58	96.67
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi barang milik daerah								
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan penyediaan pengamanan barang milik daerah (bulan)	-	-	-	-	0.00	12	12	-

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2021)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D (N- 3) 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1) 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 5+7+9	(11) = 10/4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (orang)	323	143	56	56	100.00	160	359	111.15
	Administrasi Unum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi umum								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (unit)	100	37	25	25	100.00	38	100	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dan dipelihara (unit)	58	37	49	47	95.92	5	89	153.45
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (unit)	60	36	9	5	55.56	4	45	75.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	0.00	12	12	-
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (porsi)						3,500	3,500	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan (bulan)	60	36	12	12	100.00	-	48	80.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (porsi)	25,545	9,661	4,793	3,855	80.43	-	13,516	52.91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan (bulan)	60	35	12	12	100.00	12	59	98.33
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	500	256	100	100	100.00	100	456	91.20
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan dan minum tamu yang disediakan (porsi)	-	-	-	-	0.00	583	583	-

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2021)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D (N-3) 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAN DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1) 2021)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 5+7+9	(11) = 10/4
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	150	89	20	20	100.00	-	109	72.67
	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah (kali)	240	148	50	50	100.00	-	198	82.50
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim (lembar)	5,800	3,376	1,100	1,100	100.00	1,200	5,676	97.86
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)	60	36	12	12	100.00	12	60	100.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	32	16	10	10	100.00	2	28	87.50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Unit Kerja Yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah gedung/rumah/parkiran dinas yang di sewa (unit)	5	3	-	-	0.00	-	3	60.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (unit)	55	34	19	19	100.00	-	53	96.36
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)	55	17	19	19	100.00	-	36	65.45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara rutin/berkala (unit)	-	-	-	-	0.00	2	2	-

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2021)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D (N-3) 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1) 2021)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 5+7+9	(11) = 10/4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)	-	-	-	-	0.00	19	19	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	40	23	60	60	100.00	23	106	106.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	-	-	-	-	0.00	12	12	12.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Peserta Diklat Yang Memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional								
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen yang tersusun (dokumen)	-	-	-	-	0.00	1	1	-
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Perangkat Daerah Penunjang (orang)	-	-	-	-	0.00	964	964	-
		Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum (orang)						421	421	-
	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat (orang)	494	264	900	886	98.44	-	1,150	232.79

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2021)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D (N-3) 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1) 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 5+7+9	(11) = 10/4
	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Managerial	Jumlah ASN yang mengikuti diklat (orang)	70	70	-	-	0.00	-	70	100.00
	Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus singkat/Bimtek	Jumlah ASN yang mengikuti diklat (orang)	80	33	25	25	100.00	-	58	72.50
	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Teknis Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah ASN yang mengikuti diklat (orang)	120	-	992	989	99.70	-	989	824.17
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terlaksana dan Tersusunnya, Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan serta pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional								
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat standarisasi dan sertifikasi yang diterbitkan (sertifikasi)	111	1	150	136	90.67	320	457	411.71
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Bulletin/Majalah yang dibuat (dokumen)	6	4	1	1	100.00	1	6	100.00

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2021)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D (N-3) 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1) 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 5+7+9	(11) = 10/4
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah dokumen sumber belajar dan kerjasama	2	-	1	1	100.00	1	2	100.00
		MoU berupa surat ketetapan akreditasi								
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan DalamNegeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	0.00	1	1	-
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional,Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti Latsar CPNS	-	-	-	-	0.00	264	264	-
		Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional						25	25	-
		Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan						36	36	-
	Penyusunan Instrumen Sertifikasi kompetensi	Jumlah instrumen sertifikasi kompetensi yang tersusun	2	1	-	-	0.00	-	-	-
	Pelaksanaan Jambore Inovasi	Jumlah Peserta	50	-	-	-	0.00	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

Untuk Tahun 2020 diperoleh rata-rata hasil capaian kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebesar 76,97% (tujuh puluh enam koma sembilan tujuh persen). BPSDM Provinsi Kalimantan Utara menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam APBD BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan dengan jumlah alokasi anggaran belanja APBD sebesar Rp. 11.725.590.516,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 76,97% (tujuh puluh enam koma sembilan tujuh persen) sedangkan realisasi fisik sebesar 97,22% (sembilan puluh tujuh koma dua dua persen) . Kinerja pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dari tabel berikut yang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang sdh ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel : 2.2												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah												
NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
	Persentase Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Pelatihan		$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	90%	90%	90%	90%	106.66%	113.66%	90%	90%	
	Nilai Akreditasi		Nilai Akreditasi C	C	C	C	C	C	C	B	A	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas and Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu-isu strategis dalam rangka peningkatan peranan pelatihan antara lain :

- a. Meningkatkan peran *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)* baik dalam Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana untuk melakukan pembinaan teknis substantive pelatihan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan pelatihan secara mandiri di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Menjadikan pelayanan dasar masyarakat sebagai prioritas dalam pembinaan teknis substantif pelatihan.
- d. Tuntutan ASN menjadikan tata kelola Pemerintahan yang baik di masyarakat.
- e. Belum optimalnya penerapan sistem pengelolaan program pengembangan kompetensi di lingkungan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- f. Perlunya peningkatan penanganan pelatihan bagi aparatur penyelenggara pelatihan BPSDM atas pengembangan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara pelatihan.
- g. Reformasi pelayanan publik menuju prestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- h. Perubahan paradigma baru kompetensi aparatur pemerintah daerah oleh Badan Diklat menjadi BPSDM, bukan semata-mata melaksanakan pelatihan, namun diharapkan menjadi “Pembinaan dan Kompetensi Aparatur” yang lebih mengutamakan standar kompetensi jabatan.
- i. Belum optimalnya syarat pendukung indikator kinerja sasaran yang kedua (nilai akreditasi) yang masih harus diupayakan, antara lain :
 - Kelembagaan Diklat
 - Tenaga Kediklatan
 - Rencana Strategis
 - Penjamin Pembiayaan
 - Fasilitas Diklat
 - Penjamin Mutu.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, dengan arahan Kepala Daerah yaitu Gubernur Provinsi Kalimantan Utara terkait prioritas program dan kegiatan dengan pagu indikatif yang disediakan untuk BPSDM Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Rancangan Awal RKPD 2022-2026. Review terhadap rancangan tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut (tabel 2.3).

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

Tabel : 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KENUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				10,186,486,379	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				61,210,115,795	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah BMD yang diadakan	1 gedung	50,153,000,000	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanjung Selor	Jumlah Gedung yang dibangun	1 gedung	50,153,000,000	digunakan Untuk memaksimalkan capaian kinerja serta pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara maka dipandang perlu adanya pembangunan Gedung Kantor dan Pelatihan yang secara langsung dapat menunjang kualitas BPSDM dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kinerja Perangkat Daerah	70%	1,316,405,232	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	2 dokumen	1,316,405,232	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	630,741,732	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	630,741,732	

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KENUTUHAN DANA (Rp)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	630,741,732	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	630,741,732	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	685,663,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	685,663,500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	100%	6,385,001,608	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	6,385,001,608	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor	Jumlah surat yang dikirim	13 bulan	5,966,681,608	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor	Jumlah bulan layanan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	5,966,681,608	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	418,320,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor	Jumlah bulan layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	418,320,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi barang milik daerah	100%	67,471,680	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	124,847,232	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan pengamanan barang milik daerah	12 bulan	67,471,680	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tanjung Selor	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	150 unit	124,847,232	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	73%	1,009,621,232	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	1,680,194,432	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	1 sistem	670,573,200	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	160 orang	1,009,621,232	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160 orang	1,009,621,232	

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KENUTUHAN DANA (Rp)	
	Administrasi Unum Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi umum	75%	1,081,357,291	Administrasi Unum Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1,081,357,291	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	156 unit	6,908,530	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 unit	6,908,530	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan dan dipelihara	162 unit	244,889,942	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 unit	244,889,942	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	23 unit	9,195,384	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 unit	9,195,384	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	303,348,645	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	303,348,645	
			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3500 porsi							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	22,029,790	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	22,029,790	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tanjung Selor	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1006 eksemplar	7,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tanjung Selor	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100 eksemplar	7,500,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tanjung Selor	Jumlah porsi makan dan minum tamu yangdisediakan	583 porsi	37,485,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tanjung Selor	Jumlah bulan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	37,485,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rapat rapat koordinasi,pembinaan dan pengawasan di dalam daerah dan luar daerah	50 kali	450,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	450,000,000	

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KENUTUHAN DANA (Rp)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	35,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	126,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang dikirim	1200 lembar	6,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah bulan layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 bulan	6,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	24,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	115,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 unit	5,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah bulan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan	5,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Cakupan Unit Kerja Yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	291,629,336	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	194 unit	343,310,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara rutin/berkala	2 unit	45,860,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Selor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	2 unit	70,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Tanjung Selor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	19 unit	130,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Tanjung Selor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	19 unit	150,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung Selor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	23 unit	43,310,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanjung Selor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	23 unit	43,310,000	

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KENUTUHAN DANA (Rp)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	72,159,336	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanjung Selor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	150 unit	80,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6,438,864,267	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6,703,864,267	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase ASN Peserta Diklat Yang Memiliki Kompetensi Teknis	70%	1,316,146,660	Pengembangan Kompetensi Teknis	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis dan STTPL	1589 orang	1,316,146,660	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Perangkat Daerah Penunjang	450 orang	1,316,146,660	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	204 orang	1,316,146,660	
			Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	450 orang				Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Perangkat Daerah Penunjang	964 orang		
								Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis inti jabatan administrasi	421 orang		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Terlaksana dan Tersusunnya, Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan serta pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	70%	5,122,717,607	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Akreditasi Penyelenggaraan Diklat	179 sertifikat	1,096,667,376	
								Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat dan STTPL Kompetensi Manajerial dan	785 orang	4,291,050,231	

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KENUTUHAN DANA (Rp)	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah sertifikat standarisasi dan sertifikasi yang diterbitkan	200 sertifikat	415,927,732	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Akreditasi	3 dokumen	115,000,000	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah sertifikat standarisasi dan sertifikasi yang diterbitkan	200 sertifikat	415,927,732	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah sertifikat standarisasi dan sertifikasi yang diterbitkan	100 sertifikat	415,927,732	
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Bulletin/Majalah yang dibuat	80 eksemplar	194,252,400	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Bulletin/Majalah yang dibuat	60 eksemplar	194,252,400	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen sumber belajar dan kerjasama	1 dokumen	221,487,244	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen sumber belajar dan kerjasama	13 dokumen	221,487,244	
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Modul yang dibuat	3 modul	150,000,000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional,Kepemimpinan, dan Prajabatan	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Latsar CPNS	264 orang	4,291,050,231	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional,Kepemimpinan, dan Prajabatan	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Latsar CPNS	535 orang	4,291,050,231	
			Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	25 orang				Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	120 orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	36 orang				Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	130 orang		
	JUMLAH				16,625,350,646	JUMLAH				67,913,980,062	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari Penelitian lapangan dan Pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Dari hasil musrenbang yang telah dilaksanakan terdapat beberapa usulan dari kabupaten dan kota untuk beberapa program dan kegiatan strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, namun dari usulan yang telah diusulkan oleh Kabupaten, belum dapat ditindak lanjuti karena sasaran kegiatan strategis masih di ranah SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan anggaran yang diperuntukkan masih belum mampu untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dan kegiatan yang diusulkan bukan merupakan wewenang atau ranah BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, rincian kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten Kota disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel : 2.2
Usulan Program/Kegiatan Kabupaten/ Kota
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(2)			(3)	(13)
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pelaksanaan Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. II, Kabupaten Nunukan	Diluar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti	1 paket	Diajukan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan sasaran kegiatan Pejabat JPT Pratama Kabupaten Nunukan
2		Pelaksanaan Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. III, Kabupaten Nunukan	Diluar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti	1 paket	Diajukan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi (BanKeu) dengan sasaran kegiatan Pejabat Administrator Kabupaten Nunukan
3		Pelaksanaan Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. IV, Kabupaten Nunukan	Diluar/Didalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti	1 paket	Diajukan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi (BanKeu) dengan sasaran kegiatan Pejabat Pengawas Kabupaten Nunukan
4	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi	Belanja kontribusi dan Belanja perjalanan dinas	Diluar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti	1 paket	Diajukan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi (BanKeu) dengan sasaran kegiatan Pejabat Administrator Kabupaten Nunukan
5	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Belanja bimbingan teknis	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peserta yang mengikuti	1 paket	Diajukan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi (BanKeu)
6	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kegiatan Teknis Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peserta yang mengikuti	1 paket	Diajukan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi (BanKeu) dengan sasaran kegiatan PNS Satuan Polisi Pamong Praja
7		Penyelenggaraan Diklat Teknis Percepatan Reformasi (Belanja perjalanan dinas)	Diluar/Didalam Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti	1 paket	Diajukan melalui program PendiProgram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi (BanKeu)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam arah kebijakan bidang pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara, menjadi salah satu alasan perubahan nomenklatur lembaga menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana terdapat pada Pasal 69 Ayat (1) dan (3), disebutkan bahwa pengembangan karir seorang PNS ditentukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dengan memperhatikan integritas dan moralitas. Salah satu komponen yang penting dalam pengembangan karir adalah kompetensi berupa kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga untuk melakukan pembinaan dalam pengembangan ketiga kompetensi tersebut, baik didalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara maupun pada lingkup pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada Pasal 70 Ayat (1) dan (2) dijelaskan pula bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus maupun penataran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan pada Pasal 233 bahwa Seorang Pejabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, selain memiliki ketiga

kompetensi diatas, harus pula memiliki kompetensi pemerintahan. Pasal tersebut secara tidak langsung memperkuat kebutuhan akan suatu badan yang tidak hanya melayani pengembangan tiga kompetensi yang diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tetapi juga mengembangkan kompetensi pemerintahan yang berada langsung dibawah binaan Kementerian Dalam Negeri, yaitu kompetensi pemerintahan. Dalam menetapkan kompetensi pemerintahan tersebut, perlu adanya kerangka kualifikasi pemerintahan dalam negeri, standar kompetensi pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan sertifikasi dan pengembangan kompetensi pemerintahan.

Menyikapi kebutuhan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, kebutuhan akan pengembangan tugas tersebut membutuhkan lembaga yang tidak hanya menyelenggarakan fungsi kediklatan namun harus lebih mengedepankan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan, sehingga dibentuk BPSDM.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 19 Ayat (4), serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana

pembangunan yang terintegrasi baik dari Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
yang mendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Program yang mendukung Prioritas Nasional berdasarkan BA Rakortekrenbang	Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional berdasarkan BA Rakortekrenbang	Nama Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional berdasarkan BA Rakortekrenbang	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatkan Sumberdaya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengembangan Kompetensi teknis	a. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam negeri, kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi, penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Kalimantan Utara
		2. Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	a. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintah kabupaten/kota b. Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi dan sumber belajar c. Pelaksanaan kerjasama antara lembaga d. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional e. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah jabatan pimpinan tinggi jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Kalimantan Utara

3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam rangka melaksanakan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut BPSDM Provinsi Kalimantan Utara tentunya harus dapat melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan memfasilitasi kebutuhan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma BPSDM Provinsi Kalimantan Utara saat ini adalah membentuk Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang kompeten dan professional, dan harus memiliki kompetensi serta terlibat aktif didalam setiap proses kegiatan guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui pelatihan, peningkatan keterampilan dan memberikan pengalaman yang sesuai. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPSDM Provinsi Kalimantan Utara selaku unsur pengembangan SDM aparatur penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan bidang pengembangan kompetensi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan;
2. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi aparatur dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
3. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan SDM aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;

5. Melaksanakan administrasi dalam arti luas dan sempit;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Utara sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan melalui program dan kegiatan kerja penyelenggaraan pengembangan kompetensi tahunan dengan berpedoman pada kebijakan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pengembangan kompetensi.

Tabel 3.2
Indikasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022
Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah

Prioritas Daerah	Nama Program yang mendukung prioritas daerah	Nama Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Nama Sub Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengembangan Kompetensi teknis	a. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam negeri, kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi, penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Kalimantan Utara
		2. Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	a. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah jabatan pimpinan tinggi jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Kalimantan Utara

3.2 Tujuan Dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur professional dan inovatif, sebagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah Maju dan Sejahtera “

Dan misi Gubernur Kalimantan Utara dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara

Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien dan efektif dan akuntabel dengan Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan,akuntabel dan inovatif, untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, BPSDM Provinsi Kalimantan Utara merumuskan tujuan dan sasaran yang terkait dengan visi Gubernur Kalimantan Utara dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara maka ditetapkanlah tujuan strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

- Meningkatnya Kualitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Indikator Tujuan : Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi

3.2.2. Sasaran

Perumusan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada masing-masing tahun dan indikator sasarannya, terdiri dari:

- i. Peningkatan kapasitas ASN

Indikator sasaran: ***Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dan STTPL.***

- ii. Meningkatkan Akreditasi Penyelenggara Pelatihan

Indikator sasaran: ***Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan***

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2021	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA AKHIR TAHUN 2026
1.	Meningkatnya Kualitas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi	65%	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dan STTPL	90%
				Meningkatnya Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan	Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan	A

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan, dilakukan dengan menetapkan program dan kegiatan yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara khususnya dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur selama satu tahun kedepan.

Kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran serta program yang dilaksanakan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dengan mengacu kepada Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 serta mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dengan total rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan kegiatan tahun 2022 tersebut sebesar **Rp. 67.913.980.062,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** dan untuk prakiraan maju rencana anggaran tahun 2023 sebesar **Rp. 68.202.660.823,- (Enam puluh delapan milyar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).**

Berikut ini 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

4. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan Kompetensi Teknis

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
- Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga

- Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Daftar program dan kegiatan tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

Tabel : 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		URUTAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
5	4	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				61,210,115,795	APBD Murni				61,274,943,216
5	04	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Di Dalam Provinsi Kalimantan Utara	1 gedung	50,153,000,000	APBD Murni			1 gedung	50,153,000,000
5	04	01	1	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dibangun	Tanjung Selor	1 gedung	50,153,000,000	APBD Murni		I	1 gedung	50,153,000,000
5	04	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	2 dokumen	1,316,405,232	APBD Murni			2 dokumen	1,336,484,500
5	04	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	1 dokumen	630,741,732	APBD Murni		IXA	1 dokumen	650,821,000
5	04	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	1 dokumen	685,663,500	APBD Murni		IXB	1 dokumen	685,663,500
5	04	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	12 bulan	6,385,001,608	APBD Murni			12 bulan	6,418,341,105
5	04	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan layanan gaji dan tunjangan ASN	Tanjung Selor	14 bulan	5,966,681,608	APBD Murni		VII	14 bulan	6,000,021,105
5	04	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanjung Selor	12 bulan	418,320,000	APBD Murni		IXC	12 bulan	418,320,000

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		URUTAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5 04 01 1 03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	Tanjung Selor	150 unit	124,847,232	APBD Murni		IXD	150 unit	67,471,680
5 04 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	12 bulan	1,680,194,432	APBD Murni			12 bulan	1,698,978,640
5 04 01 1 05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	1 sistem	670,573,200	APBD Murni		VIV	1 sistem	688,926,540
5 04 01 1 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	160 orang	1,009,621,232	APBD Murni		VIII	160 orang	1,010,052,100
5 04 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	12 bulan	1,081,357,291	APBD Murni			12 bulan	1,131,357,291
5 04 01 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tanjung Selor	12 unit	6,908,530	APBD Murni		IXE	15 unit	6,908,530
5 04 01 1 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tanjung Selor	15 unit	244,889,942	APBD Murni		IXF	15 unit	244,889,942
5 04 01 1 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Tanjung Selor	5 unit	9,195,384	APBD Murni		IXG	5 unit	9,195,384
5 04 01 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanjung Selor	12 bulan	303,348,645	APBD Murni		IXH	12 bulan	303,348,645
5 04 01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tanjung Selor	12 bulan	22,029,790	APBD Murni		IXJ	12 bulan	22,029,790

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		URUTAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5 04 01 1 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan					Tanjung Selor	100 eksemplar	7,500,000	APBD Murni		IXK	100 eksemplar	7,500,000
5 04 01 1 06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu					Tanjung Selor	12 bulan	37,485,000	APBD Murni		IX-L	12 bulan	37,485,000
5 04 01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	12 bulan	450,000,000	APBD Murni		IX-M	12 bulan	500,000,000
5 04 01 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	12 bulan	126,000,000	APBD Murni			12 bulan	126,000,000
5 04 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Tanjung Selor	12 bulan	6,000,000	APBD Murni		IXN	12 bulan	6,000,000
5 04 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Tanjung Selor	12 bulan	115,000,000	APBD Murni		IX-O	12 bulan	115,000,000
5 04 01 1 09 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Tanjung Selor	12 bulan	5,000,000	APBD Murni		IX-P	12 bulan	5,000,000
5 04 01 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	194 unit	343,310,000	APBD Murni			194 unit	343,310,000
5 04 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Tanjung Selor	2 unit	70,000,000	APBD Murni		IX-Q	2 unit	70,000,000
5 04 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Tanjung Selor	19 unit	150,000,000	APBD Murni		IX-R	19 unit	150,000,000

Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2022


KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		URUTAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5 04 02 1 01 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Tanjung Selor	23 unit	43,310,000	APBD Murni		IX-S	23 unit	43,310,000
5 04 02 1 01 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	Tanjung Selor	150 unit	80,000,000	APBD Murni		IX-T	150 unit	80,000,000
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6,703,864,267	APBD Murni				6,927,717,607
5 04 02 1 01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis dan STTPL	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	1589 orang	1,316,146,660	APBD Murni			1389 orang	1,500,000,000
5 04 02 1 01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	204 orang	1,316,146,660	APBD Murni		III	292 orang	1,500,000,000
		Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Perangkat Daerah Penunjang		964 orang		APBD Murni		IVA	556 orang	
		Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis inti jabatan administrasi		421 orang		APBD Murni		IVB	541 orang	
5 04 02 1 02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Akreditasi Penyelenggaraan Diklat	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	179 sertifikat	1,096,667,376	APBD Murni			211 sertifikat	1,136,667,376
		Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat dan STTPL Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Di Dalam dan Di Luar Provinsi Kalimantan Utara	785 orang	4,291,050,231	APBD Murni			510 orang	4,291,050,231
5 04 02 1 02 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Akreditasi	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	3 dokumen	115,000,000	APBD Murni		VB	3 dokumen	130,000,000

2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		URUTAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5 04 02 1 02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat standarisasi dan sertifikasi yang diterbitkan	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	100 sertifikat	415,927,732	APBD Murni		VC	130 sertifikat	415,927,732
5 04 02 1 02 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Bulletin/Majalah yang dibuat	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	60 eksemplar	194,252,400	APBD Murni		X	60 eksemplar	194,252,400
5 04 02 1 02 05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah dokumen sumber belajar dan kerjasama	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	13 dokumen	221,487,244	APBD Murni		IVC	15 dokumen	221,487,244
5 04 02 1 02 06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Modul yang dibuat	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	3 modul	150,000,000	APBD Murni		IVD	3 modul	175,000,000
5 04 02 1 02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti Latsar CPNS	Di Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	535 orang	4,291,050,231	APBD Murni		VI	270 orang	4,291,050,231
		Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional		120 orang		APBD Murni		II	120 orang	
		Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan		130 orang		APBD Murni		VA	120 orang	
JUMLAH					67,913,980,062					68,202,660,823

Tanjung Berau, 10 Maret 2021

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,



MUHAMMAD SYAH SE, MM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640823 198601 1 002

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara merupakan rancangan pedoman perencanaan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan program dan kegiatan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara secara rinci. Penyusunan Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara ini dimaksudkan untuk memenuhi tahapan dalam penyusunan renja sebelum didefinisikan sebagai Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara memuat evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara tahun lalu dan capaian Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari masing-masing program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunan Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan dan isu-isu dimasa mendatang dengan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Provinsi Kalimantan Utara.

Keberhasilan implementasi Renja ini sangat bergantung pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya yang sungguh-sungguh dari segenap unsur di lingkungan BPSDM sendiri, serta dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai mitra dan stakeholders. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini juga menjadi harapan nyata bagi keberhasilan peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memberikan outcome yang nyata, BPSDM Kalimantan Utara tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi yang merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan Renja BPSDM sendiri. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tertib dan efektif serta hasilnya disampaikan secara berjenjang dalam bentuk laporan tertulis. Adapun

dengan catatan yang menjadi perhatian dalam rangka untuk memaksimalkan capaian kinerja serta pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara maka dipandang perlu adanya pembangunan gedung kantor dan pelatihan yang secara langsung dapat menunjang kualitas BPSDM dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat menjadi perhatian dalam perumusan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan tersusunnya Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, Agustus 2021
Kepala Badan,



MUHAMAD ISHAK, SE, MM
Perwakilan Utama Madya, (IV/d)
NIP. 19640823 198601 1 002